

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait,

⁸ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 41.

sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁹

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1.1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

1.2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

⁹ *Ibid*, hlm. 23.

1.3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹¹

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 46.

¹¹ *Ibid*, hlm. 48.

2.1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

2.2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.¹²

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan

¹² *Ibid*, hlm. 49.

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹³

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”*.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus

¹³ Ibid hlm. 49.

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.¹⁴

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Menurut P.A.F. Lamintang :

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

2. Menurut Andi Hamzah :

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

¹⁵ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 9.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak

¹⁷ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 22

sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* hlm. 25-27

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

C. Penegak dan Penegakan Hukum Dalam Jual Beli Satwa Dilindungi

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap jual beli satwa dilindungi, dilakukan oleh BKSDA dan Kepolisian dengan cara pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA dan Kepolisian dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Sementara penegakan hukum dengan cara penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus dengan membawa para pelaku tindak pidana jual beli satwa dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku.¹⁹ Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh PPNS dan Kepolisian Ditreskrimsus berdasarkan dengan peraturan yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta/Sulistyo Budi Prabowo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam tindakan jaul beli satwa dilindungi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁰ Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

²¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam jual beli satwa dilindungi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :²⁴

²² Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

²³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

²⁴ *Ibid* hlm 39

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pembagaian sub sistem

struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

E. Kewenangan Penyidik Polri dan BKSDA Dalam Penanganan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi

Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) memberikan peran utama kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana.²⁵

²⁵ Kelana, Momo, "memahami Undang-undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal", Jakarta, PTIK "Press", 2002. Hlm.80-81.

Mengenai penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi, dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun kewenangan penyidik menurut pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diatur dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berbeda dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. Mementa keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
6. Membuat dan mendatangani berita acara;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Selanjutnya pada ayat (4) dinyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-undang No.8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penyidikan, polri memiliki kewenangan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 antara lain, yaitu :

1. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
2. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

3. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai mana yang tertuang di pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 di atas, polri tidak berkerja sendiri akan tetapi dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Demikian juga halnya dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik polri dibantu juga oleh PPNS. Hal ini dipertegas melalui pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Polri dan PPNS yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Kemudian dipertegas lagi melalui pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah polri dibantu dengan Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Sedangkan kewenangan Polri (penyidik Polri) dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 9. Mengadakan penghentian penyidikan;
 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Kewenangan PPNS diatur menurut peraturan perundang-undangnya masing-masing.

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi atau tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa :

“selain pejabat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Adapun kewenangan PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA) menurut pasal 39 ayat (2) adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
6. Membuat dan mendatangi berita acara;
7. Menghentikan penyidikan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penyidik Polri maupun PPNS memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jual beli satwa dilindungi. Meskipun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS namun tidak mengurangi substansi penyidikan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa :

“penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyitaan yang diperlukan”.

Selain itu terdapat hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh PPNS dalam melakukan penyidikan, antara lain adanya kewajiban yang melekat pada PPNS untuk selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan wajib melaporkan penyidikan yang dilakukan olehnya kepada penyidik Polri dan demikian juga sebaliknya, pada penyidik Polri juga terdapat kewajiban untuk memberikan bantuan teknis penyidikan kepada PPNS. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 107 ayat (1), (2), dan (3) KUHP yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan”.

Ayat (2) :

“Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian

ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri”.

Ayat (3) :

“Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri”.

F. Pengenalan Bentuk Dan Kegunaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam hayati yang memanfaatkannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhannya serta meningkatkan kualitas bantuan dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berasaskan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuannya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung dukungan peningkatan keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.(Pasal 1 angka 2 UU

No.5 Th. 1990). Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menetapkan:

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.²⁶

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta

²⁶ Blogmhariyanto' "Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami", dikutip dari <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/06/konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan.html> <diunduh tanggal 25 Februari 2020>

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, diantaranya melalui pendidikan dan penyuluhan. Dalam rangka pelaksanaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah.²⁷

²⁷ Ampl' "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan", dikutip dari <http://www.ampl.or.id/digilib/read/konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya/47619> <diunduh tanggal 25 Februari 2020>

G. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

a. Pengertian Satwa

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut: *“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.”* Pengertian “satwa liar” dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni sebagai berikut: *“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”* Penjelasan Pasal 1 butir 7 memuat sebagai berikut: *“Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa.”* Kadang-kadang “binatang liar” diidentikan dengan “binatang buas”, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua “binatang liar” termasuk “binatang buas”. Hal yang sangat erat hubungannya dengan “satwa” adalah “habitat”. Pengertian “habitat” menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.²⁸

b. Keadaan Satwa di Indonesia

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah jenis satwa yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran, buku *“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”* terbitan Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991, memuat antara lain:

²⁸ Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm. 47.

“Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan 400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3.000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku-pakuan.”

Dengan demikian satwa atau fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa.

Berdasarkan kenyataan yang ada satwa termasuk makhluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya:

- a. *Carvotano* di Kalimantan
- b. *Anoa* di Sulawesi
- c. *Bayan* di Sumatera
- d. *Cendrawasih* di Irian Barat dan lain-lain.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat antara lain: *“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian dari terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsure pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”*

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecendrungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.²⁹

c. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan (fauna) yang terkait dengan “satwa” yang berlaku saat ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018

Dalam “*Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*”, Indonesia turut mendatanganinya, namun karena belum dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, konvensi tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia. Perlindungan

²⁹ Leden Marpaung, *op,cit.*, 48

terhadap “*satwa*” umumnya ditunjukan terhadap satwa yang cenderung punah. Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- 2) Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- 3) Jarang, populasi berkurang.

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 terhadap satwa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 termasuk hasil hutan. Hal ini dimuat pada penjelasan Pasal 1 ayat (2) yang rumusannya adalah sebagai berikut: “*Hasil hutan seperti satwa buru, satwa elok, dan lain-lain serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.*” Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan “satwa liar” aras dua jenis yakni:

- 1) Satwa liar dilindungi.
- 2) Satwa liar tidak dilindungi.³⁰

Akan tetapi, nampaknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tidak memuat perlindungan terhadap satwa yang dilindungi secara langsung. Perlindungan satwa dimuat olehn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dengan demikian

³⁰ Leden Marpaung, *op.cit.*, 49.

Ordonasi Perlindungan Binatang-Binatang Liar 1931 telah dicakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

d. Jumlah Satwa yang Dilindungi

Sebanyak 1.771 jenis burung di dunia diketahui berada di Indonesia, bahkan 562 jenis di antaranya berstatus dilindungi. Status ini ditetapkan berdasarkan peraturan menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang “Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi”, yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018.

Selain jenis burung, dalam peraturan tersebut juga tercantum jenis lain yang dilindungi, yaitu 137 jenis mamalia, 37 jenis reptil, 26 jenis insekta, 20 jenis ikan, 127 jenis tumbuhan, 9 jenis dari krustasea, moluska dan xiphosura, serta satu jenis amfibi, sehingga total ada 919 jenis.

"Terdapat penambahan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam P.20/2018, yaitu sebanyak 241 jenis atau 26% dari daftar yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 (PP.7/1999), tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa," jelas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno dalam keterangan tertulis, Selasa (7/8/2018).

adapun perubahan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi menjadi tidak dilindungi ataupun sebaliknya, merupakan mandat PP. 7/1999 pasal 4 ayat (3), setelah Menteri LHK mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan (Scientific Authority) LIPI.

Berdasarkan PP. 7/1999, kriteria penetapan suatu jenis menjadi dilindungi memiliki kriteria antara lain, mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan memiliki daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Tujuan PP. 7/1999 itu sendiri adalah untuk:

- 1) menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan,
- 2) menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,
- 3) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.³¹

e. Penyebab Kepunahan Satwa Liar

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu:

- 1) Berkurang dan rusaknya habitat
- 2) Perdagangan satwa liar

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta

³¹ News.detik' "Sebanyak 1.771 jenis burung di dunia diketahui berada di Indonesia" dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4153773/kini-ada-919-tumbuhan--satwa-di-indonesia-dilindungi-undang-undang> <diunduh tanggal 28 Februari 2020>

hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar.

Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orangutan, harimau sumatera, dan gajah sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

Setelah masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.

Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. Perdagangan satwa liar itu adalah kejam! Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. Sebanyak 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat

menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Banyak dari penyakit yang diderita satwa itu bisa menular ke manusia.³²

H. Satwa Langka Di Lindungi Yang Sering Di Perjual Belikan Secara Ilegal

1. Trenggiling

Dari sekian banyak satwa paling banyak yang suka saat ini adalah jenis trenggiling. Trenggiling dari segi volumenya, setiap kasus (diungkap) dapat mencapai ton dan puluhan ribu (trenggiling). Perdagangan tujuan pasar menuju Asia. Permintaan besar menyebabkan perburuan dan perdagangan hewan itu. Trenggiling dianggap memiliki terhitung khasiat untuk kesehatan. Seharusnya trenggiling dapat diperoleh di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Namun saat ini, ada pula pemburu yang mencari trenggiling di Pulau Jawa.

2. Burung Rangkong Gading

Belakangan muncul tren perburuan burung rangkong gading. Saat ini ada peningkatan permintaan pasar terhadap rangkong gading. Cula dari hewan yang hidup di Kalimantan dan Sumatera dijual ke Cina untuk memasok obat tradisional. Harganya lebih mahal daripada gading gajah.

³² Profauna' "Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal", dikutip dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XQ86wz8zbIV> <diunduh tanggal 28 Februari 2020>

3. Burung Jalak Bali

Puluhan ribu burung dijual secara ilegal di tiga pasar di Jakarta: Pasar Pramuka, Jatinegara, dan Barito. Beberapa burung yang dijual termasuk kategori sudah seperti Jalak Bali. Burung-burung yang masuk kategori itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 dilarang diperjualbelikan. Selain sudah punah, beberapa burung seperti Jalak Putih, poksay kuda, Gelatik Jawa, Poksay Sumatra, Nuri bayan, Cucakrawa, Bubut Jawa; masuk daftar merah International Union for Convention Nature.

4. Hewan langka asal Papua

Pada Juli 2015, polisi menangkap 30 ekor ular Condrophyton Viridis atau ular Phytan hijau Papua, 1 Biawak Doerus atau biawak ekor biru, 3 ekor Biawak hijau papua, 1 ekor kadal payung, asal Papua. "Dari 30 ekor Condrophyton Viridis ini terdiri dari 15 ekor condro dewasa dan 15 ekor condro anakan, yang semuanya terdiri dari langka asal Papua dan Kepulauan Aru," kata Direktur Tipiter Mabes Polri, Brigadir Jenderal Yazid Fananie. Bisnis penangkaran dan penjualan hewan langka dan dilindungi asal Papua ini sudah tahun 2012 lalu, "Untuk ular jenis condrophyton anakan atau yang masih kecil mereka jual dengan harga Rp 1 juta, sedangkan untuk yang dewasa tergantung harga dari komunitas dan pecintanya," kata dia.

5. Lain-lain

Satwa lain yang juga banyak suka diperjual belikan adalah harimau, gajah gading, primata seperti orang utan. Kepala Balai Besar

Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta, Muhammad Musyaffak Fauzi, mengatakan penyelundupan hewan langka atau hewan yang tidak dilindungi ke luar negeri cukup dilakukan oleh penumpang pesawat.

Tahun 2013, sebanyak 15 kasus, 9 disetujui sebagai hewan yang dilindungi seperti Burung Murai Batu, Kakak Tua Jambul Kuning, Kepala Nuria Hitam, Burung Bayan dengan tujuan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong. Tahun 2014 sebanyak 10 kasus, dengan negara tujuan Cina, Hongkong, Thailand, Amerika dan Kuwait. Orang Utan, Siamang, Kakak Tua Raja, Sanca Batik, Kura Kura Moncong Babi, Cenderawasih, Cenderawasih Raja, Burung Sabit Merah, Cuca Papua Merah.

Tahun 2015, sebanyak 19 kasus termasuk penyelundupan hewan dan bagian tubuh hewan langka seperti kulit Harimau, Tulang Harimau, Gading Gajah, Burung Cucak Jongkok, hingga taring Macan. Negara tujuan Arab Saudi, Jerman, Mesir, Rusia dan Cina. Hewan-hewan yang gagal diselundupkan ada dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan ada juga yang mati lalu dimusnahkan.³³

³³ Tekno.tempo' "Satwa lain yang juga banyak suka diperjual belikan adalah harimau, gajah gading, primata seperti orang utan", dikutip dari <https://tekno.tempo.co/read/1210268/bayi-komodo-selundupan-berasal-dari-flores-utara-bukan-tnk> <diunduh tanggal 29 Februari 2020>

I. Pengertian Hukum Tentang Jual Beli Satwa Yang Di Lindungi Secara Ilegal

Perdagangan satwa liar dilindungi masih marak terjadi. Hukuman yang ringan disertai denda yang sedikit membuat para pelaku belum merasakan efek jera sebagai bentuk pertaubatan. Alasan ekonomi dan faktor usia pelaku yang telah lanjut merupakan dalil yang membuat “hati” hakim terenyuh tanpa melihat dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Meski para pelaku, umumnya bukanlah pemain baru. Akibatnya, vonis hakim yang jauh dari harapan itu terlihat dari beberapa kasus yang ditandai dengan hukuman ringan untuk pelaku. Apakah argumen ini bisa diamini? Atau memang ada yang salah dengan proses penegakan hukum kita?

UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dianggap sudah tidak efektif. Aturan hukum yang telah berusia 25 tahun itu, belum memberikan vonis minimal sehingga pelaku acapkali hanya dihukum dalam hitungan bulan.

Pandangan Islam Dalam Hukum Jual Beli Hewan Yang Dilindungi, Pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara', Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidak berlaku lagi. Jika kita kembali ke hukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannyapun akan menjadi haram. Praktek jual-beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram, menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-

menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selain hal diatas, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat yang bersifat kasuistik. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidakseimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'. Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.

- a. Al-Qolyubi (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 2. Hal. 203

“Imam Rafi’i memberikan alasan bahwa praktek jual beli barang tidak bermanfaat sangat dekat sekali dengan hukum mengambil harta dengan cara batil, Allah telah berfirman (*janganlah kalian makan harta diantara kamu dengan cara bathil*).”

- b. Hasyiyah al-Jamal Li Zakaria al-Anshari (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 3. Hal. 26

“Menjual sesuatu yang berbahaya bagi diri manusia tidak diperbolehkan, karena tidak ada manfaatnya. Kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hukum keharaman tersebut hanya untuk orang yang akan mengkonsumsi saja, sehingga

ketika barang itu tidak berbahaya baginya menjadikan hukum keharaman tidak berlaku lagi, atau yang dibuat sebagai landasan hukum adalah umumnya masyarakat sehingga keharaman itu tetap berlaku lagi walaupun tidak berbahaya baginya? Hal ini sangat butuh pemikiran yang mendalam, tetapi yang sangat mendekati benar adalah hukum haram tetap berlaku baginya”.³⁴



³⁴ Profauna' "Jika kita kembali ke hukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram", dikutip dari <https://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi#.XQ8P7j8zbIU> <diunduh tanggal 29 Februari 2020>